



## Mekanisme Penilaian Kelayakan Kredit Guna Bhakti pada Segmen Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Manajemen Risiko Perbankan: Studi pada Bank BJB KCP Pangleseran Kabupaten Sukabumi

Aneu Nurul Himah

Universitas Nusa Putra

Email: [aneu.nurul\\_mn22@nusaputra.ac.id](mailto:aneu.nurul_mn22@nusaputra.ac.id)

### Article Info

Submitted: Mei 2026

Revised: Mei 2026

Accepted: Mei 2026

Published: Mei 2026

**Keywords:** Bank BJB;  
Kelayakan Kredit; Kredit; PNS

### Abstrak

Penyaluran kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan segmen strategis perbankan yang memerlukan penilaian kelayakan yang cermat untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Artikel ini mengkaji proses penilaian kelayakan pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) kepada PNS di Bank BJB KCP Pangleseran, Kabupaten Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan program magang periode Februari hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian kelayakan kredit di Bank BJB KCP Pangleseran dilaksanakan secara sistematis melalui delapan tahapan utama, mulai dari pengajuan permohonan, BI Checking melalui SLIK OJK, verifikasi dokumen, analisis kelayakan, hingga monitoring pascapencapaian. Faktor penentu kelayakan kredit mencakup status kolektibilitas nasabah (kolektibilitas 1/lancar), kelengkapan dokumen administrasi, Debt Service Ratio (DSR), serta surat rekomendasi atasan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini mencerminkan implementasi manajemen risiko yang efektif dalam menjaga kualitas portofolio kredit. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi verifikasi dokumen dan peningkatan fitur layanan kredit pada aplikasi BJB Digi untuk meningkatkan efisiensi proses tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

## 1. PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan pilar utama perekonomian nasional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) (Ceysa et al., 2024). Salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi (Laratmase et al., 2024). Kredit yang disalurkan secara tepat dan berdasarkan penilaian yang komprehensif akan memberikan manfaat ganda: bagi debitur sebagai sumber pembiayaan, dan bagi bank sebagai sumber pendapatan utama melalui bunga kredit (Dara et al., 2025).

Dalam praktiknya, penyaluran kredit tidak terlepas dari risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan* (NPL). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas NPL maksimal 5% sebagai standar kesehatan perbankan (Fauzan & Khairunnisa, 2023). Untuk menjaga kualitas portofolio kredit, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam setiap keputusan pemberian kredit, salah satunya melalui analisis 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy* (Afandi, 2020).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan segmen debitur yang dinilai memiliki risiko kredit relatif rendah karena memiliki penghasilan tetap yang terjamin dari anggaran negara, sistem pensiun yang terstruktur, serta jaminan berupa Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai *collateral* (Silmi, 2023). Hal ini menjadikan PNS sebagai target pasar strategis bagi bank pembangunan daerah, termasuk Bank BJB selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten (Manda,



2022). Produk Kredit Guna Bhakti (KGB) yang ditawarkan Bank BJB dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumtif PNS dengan jangka waktu hingga 25 tahun dan mekanisme pembayaran melalui pemotongan gaji otomatis (Hulmun & Anwar, 2025).

Meski demikian, penyaluran kredit kepada PNS tidak sepenuhnya bebas risiko (Akbar et al., 2024). Permasalahan seperti pemalsuan dokumen, kredit ganda (*over-financing*), perubahan status kepegawaian, dan ketidakmampuan bayar tetap menjadi tantangan nyata yang dihadapi bank. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prosedur dan faktor-faktor yang menentukan kelayakan kredit bagi PNS menjadi sangat penting, baik dari sisi operasional bank maupun dari perspektif pelayanan kepada nasabah.

Dalam rangka memperoleh pemahaman langsung terhadap dinamika tersebut, penulis melaksanakan kegiatan magang (*internship*) di Bank BJB KCP Pangleseran selama lima bulan, terhitung sejak 3 Februari hingga 30 Juni 2025. Selama kegiatan berlangsung, penulis ditempatkan pada divisi Administrasi Operasional yang secara langsung menangani proses pelayanan dan administrasi kredit kepada nasabah, khususnya PNS. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati, mencatat, dan menganalisis proses penilaian kelayakan kredit secara komprehensif, mulai dari tahap penerimaan berkas hingga pencairan dana.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam proses penilaian kelayakan kredit di Bank BJB KCP Pangleseran (Wulandari et al., 2025). Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yakni periode 3 Februari hingga 30 Juni 2025, bertempat di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangleseran yang beralamat di Jalan Pelabuhan II No. KM.12, RT.003/RW.001, Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka program magang Study Completion Program (SCP) Universitas Nusa Putra Sukabumi, di mana penulis ditempatkan pada divisi Administrasi Operasional yang secara langsung menangani proses pelayanan dan administrasi kredit kepada nasabah. Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan operasional harian, mulai dari membantu nasabah mengisi formulir pengajuan kredit, memeriksa kelengkapan berkas, menginput data nasabah ke dalam sistem SLIK OJK, melakukan registrasi berkas, hingga pengarsipan dokumen kredit secara sistematis.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati dan ikut terlibat dalam alur kerja harian divisi Administrasi Operasional, sehingga penulis dapat memahami secara nyata bagaimana proses penilaian kelayakan kredit berlangsung dari awal hingga akhir. Wawancara dilakukan secara informal dengan *Account Officer* (AO), *Supervisor Manager*, dan staf Administrasi Operasional guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur dan kebijakan internal bank dalam menilai kelayakan calon debitur PNS. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pencatatan prosedur operasional, formulir kredit, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan proses pemberian kredit. Ketiga metode ini digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh saling melengkapi dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai praktik penilaian kelayakan kredit di Bank BJB KCP Pangleseran.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank BJB KCP Pangleseran

Bank BJB KCP Pangleseran merupakan kantor cabang pembantu dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), yang berdiri sejak 20 Mei 1961 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61. Sebagai bank milik pemerintah daerah (BUMD), Bank BJB mengemban misi sebagai penggerak perekonomian daerah sekaligus mitra utama pemerintah dalam pengelolaan keuangan. KCP Pangleseran melayani wilayah Kecamatan Cikembar dan sekitarnya dengan produk unggulan kredit konsumtif bagi PNS, yakni Kredit Guna Bhakti (KGB) dan Kredit Purna Bhakti (KPB).



Gambar 1. Logo Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (BJB)

B. Tahapan Penilaian Kelayakan Kredit Guna Bhakti

Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara, proses penilaian kelayakan Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Pangleseran dilaksanakan melalui delapan tahapan sistematis sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Proses Penilaian Kelayakan Kredit Guna Bhakti di Bank BJB KCP Pangleseran

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Output
1	Pengajuan Permohonan	Calon debitur PNS mengisi formulir dan menyerahkan dokumen lengkap kepada <i>Account Officer</i> (AO)	Berkas pengajuan kredit
2	Simulasi Kredit	AO menghitung plafond, tenor, cicilan, dan <i>Debt Service Ratio</i> (DSR)	Simulasi persetujuan calon debitur
3	BI <i>Checking</i> (SLIK OJK)	Pemeriksaan riwayat kredit dan kolektibilitas debitur di seluruh lembaga keuangan	Status kolektibilitas nasabah
4	Verifikasi Dokumen	Pemeriksaan keaslian dan kelengkapan SK, slip gaji, KTP, KK, NPWP, surat rekomendasi	Dokumen valid dan lengkap
5	Analisis Kelayakan	AO menyusun proposal kredit; keputusan oleh pejabat berwenang sesuai plafond	Keputusan kredit (disetujui/ditolak)
6	Akad Kredit	Penandatanganan perjanjian kredit; penetapan auto-debet melalui sistem SITANTI	Perjanjian kredit ditandatangani
7	Pencairan Dana	Pembukaan rekening BJB dan pencairan dana kredit ke rekening debitur	Dana kredit cair
8	<i>Monitoring</i>	Pemantauan kedisiplinan pembayaran cicilan dan stabilitas pekerjaan debitur	Laporan monitoring kredit

Sumber: Data observasi lapangan (2025)

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tahapan BI *Checking* melalui SLIK OJK merupakan titik kritis (*critical point*) yang paling menentukan dalam proses penilaian kredit. Calon debitur yang memiliki riwayat kredit



bermasalah (kolektibilitas 2–5) secara otomatis akan ditolak atau dipertimbangkan secara sangat ketat, tanpa memandang kelengkapan dokumen lainnya (Takarendehang et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 yang mewajibkan bank untuk melakukan pemeriksaan kualitas aset debitur sebelum pencairan kredit dilakukan.

**C. Analisis Faktor Penentu Kelayakan Kredit: Pendekatan 5C**

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kelayakan kredit di Bank BJB KCP Pangleseran dapat dianalisis menggunakan kerangka 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang merupakan standar analisis kredit perbankan internasional (Afandi, 2012). Penerapan prinsip 5C dalam praktik penilaian kredit PNS di Bank BJB KCP Pangleseran dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2. Implementasi Prinsip 5C dalam Penilaian Kelayakan Kredit PNS di Bank BJB KCP Pangleseran

No.	Faktor Penilaian	Indikator	Keterangan
1	<i>Character</i> (Karakter)	Riwayat kredit (SLIK/BI <i>Checking</i> )	Kolektibilitas 1 (Lancar) disyaratkan
2	<i>Capacity</i> (Kapasitas)	<i>Debt Service Ratio</i> (DSR) & slip gaji	Cicilan tidak melebihi 70% penghasilan
3	<i>Capital</i> (Modal)	Aset & kepemilikan debitur	Dinilai untuk mengukur stabilitas finansial
4	<i>Collateral</i> (Agunan)	SK PNS sebagai jaminan utama	SK pengangkatan PNS menjadi collateral utama
5	<i>Condition</i> (Kondisi)	Status kepegawaian & kebijakan dinas	Bebas sanksi; ada MoU instansi dengan bank

Sumber: Data wawancara dan observasi lapangan (2025)

- 1) Dari aspek *Character*, riwayat kredit nasabah yang tercermin dalam data SLIK menjadi indikator utama. PNS dengan kolektibilitas 1 (lancar) menunjukkan karakter yang bertanggung jawab dalam mengelola kewajiban keuangan. Temuan ini konsisten dengan Anggraini dan Widyastuti (2020) yang menyatakan bahwa riwayat pembayaran merupakan prediktor terkuat dalam menilai karakter debitur.
- 2) Dari aspek *Capacity*, analisis *Debt Service Ratio* (DSR) menjadi instrumen utama. Bank BJB mensyaratkan bahwa total cicilan kredit tidak melebihi 70% dari penghasilan bersih debitur. Bagi PNS dengan sistem penggajian melalui instansi, verifikasi slip gaji dan sistem SITANTI (Sistem Informasi Transaksi Non-Tunai) memudahkan bank dalam memastikan kapasitas pembayaran secara akurat dan real-time.
- 3) Dari aspek *Collateral*, SK pengangkatan sebagai PNS berfungsi sebagai agunan utama yang membedakan produk KGB dari kredit konsumtif pada umumnya. SK PNS memiliki nilai jaminan yang kuat karena bersifat permanen dan diakui secara hukum, sehingga memperkecil risiko gagal bayar akibat hilangnya sumber penghasilan (Putri & Yahanan, 2021).
- 4) Dari aspek *Condition*, keberadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank BJB dengan instansi pemerintah daerah menjadi faktor kondisi yang sangat mendukung. MoU ini memungkinkan mekanisme potong gaji langsung (auto-debet) melalui bendahara instansi, sehingga risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalisir secara sistemik.

**D. Kendala dan Solusi dalam Proses Pemberian Kredit**

Meskipun prosedur penilaian kelayakan kredit di Bank BJB KCP Pangleseran telah berjalan secara terstandarisasi, terdapat beberapa kendala operasional yang ditemukan selama kegiatan magang berlangsung. Berikut diuraikan masing-masing kendala beserta solusi yang dapat diterapkan.



a. Risiko Pemalsuan Dokumen



Gambar 2 Verifikasi dokumen nasabah untuk kelayakan kredit

Kendala pertama yang ditemukan adalah risiko pemalsuan dokumen, terutama yang berkaitan dengan keaslian SK pengangkatan PNS dan slip gaji. Proses verifikasi yang masih mengandalkan pengecekan manual oleh petugas memerlukan waktu yang relatif lama dan sangat bergantung pada ketelitian individu. Apabila pemalsuan dokumen tidak terdeteksi pada tahap ini, maka bank berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar di kemudian hari. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengembangkan sistem verifikasi dokumen secara digital yang terintegrasi langsung dengan *database* Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan sistem integrasi tersebut, keaslian SK pengangkatan PNS maupun data kependudukan dapat diverifikasi secara otomatis dan *real-time*, sehingga potensi lolosnya dokumen palsu dapat diminimalisir secara signifikan tanpa harus memperpanjang waktu proses verifikasi.

b. Potensi *Over-Financing*



Gambar 3 Pengecekan nasabah menggunakan aplikasi SLIK Ojk

Kendala kedua adalah potensi *over-financing* yang tidak selalu dapat terdeteksi secara sempurna melalui sistem SLIK. Hal ini disebabkan adanya jeda waktu pembaruan data pada sistem, sehingga pinjaman yang baru saja dicairkan di lembaga keuangan lain belum tentu langsung tercatat dan terlihat saat pemeriksaan dilakukan.



Kondisi ini dapat menyebabkan debitur memiliki beban cicilan yang melebihi kemampuan finansialnya secara kumulatif, meskipun secara individual setiap pengajuan tampak memenuhi syarat DSR yang ditentukan. Sebagai solusi, bank perlu memperketat prosedur konfirmasi langsung kepada calon debitur terkait seluruh kewajiban kredit yang sedang berjalan di lembaga keuangan manapun, termasuk kewajiban yang mungkin belum terdata di SLIK. Selain itu, penambahan klausul pernyataan bermaterai mengenai tidak adanya pinjaman aktif di tempat lain dapat dijadikan dokumen pelengkap yang memperkuat perlindungan hukum bagi bank apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai.

c. Perubahan Status Kepegawaian yang Tidak Dilaporkan

Kendala ketiga yang ditemukan adalah perubahan status kepegawaian yang tidak dilaporkan secara tepat waktu kepada pihak bank. Mutasi ke daerah lain, pensiun dini, ataupun pemecatan dapat mengganggu mekanisme potong gaji otomatis yang menjadi andalan dalam sistem pembayaran KGB. Apabila perubahan tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan penyesuaian perjanjian kredit, maka potensi kredit bermasalah menjadi semakin besar. Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala ini adalah dengan membangun sistem notifikasi otomatis yang terhubung antara bank, bendahara instansi, dan debitur. Setiap perubahan status kepegawaian yang tercatat di sistem BKN seharusnya dapat langsung memicu notifikasi kepada pihak bank agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Di samping itu, penguatan klausul dalam perjanjian kredit yang mewajibkan debitur melaporkan setiap perubahan status kepegawaian secara aktif kepada bank perlu ditegaskan kembali pada saat penandatanganan akad kredit dilakukan (Handayani & Nengsih, 2019).

## E. Implementasi Manajemen Risiko dan Implikasinya

Proses penilaian kelayakan kredit yang sistematis di Bank BJB KCP Pangleseran mencerminkan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif. Hal ini sejalan dengan kerangka teoritis Machendrawaty (2019) yang mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks perbankan, tujuan utama manajemen risiko kredit adalah menjaga rasio NPL tetap di bawah ambang batas regulasi OJK (5%) sekaligus mempertahankan pertumbuhan portofolio kredit yang sehat. Penerapan prinsip kehati-hatian melalui delapan tahapan verifikasi yang ketat, dikombinasikan dengan mekanisme *monitoring* pasca pencairan, menunjukkan bahwa Bank BJB KCP Pangleseran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran kredit, tetapi juga pada sustainabilitas kualitas aset.

Temuan ini mendukung argumen (Wulandari et al., 2025) bahwa manajemen risiko kredit yang efektif merupakan determinan utama kinerja keuangan bank pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dari perspektif kepuasan nasabah, prosedur yang terstandarisasi dan transparan berkontribusi positif terhadap persepsi nasabah tentang profesionalisme bank. Namun, kompleksitas persyaratan dokumen dan lamanya proses verifikasi menjadi faktor yang berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, khususnya bagi PNS yang membutuhkan dana mendesak. Digitalisasi proses verifikasi melalui integrasi sistem antara Bank BJB dengan *database* kepegawaian BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Dukcapil berpotensi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian (Bahagia, 2025).



## 4. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penilaian kelayakan pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) kepada Pegawai Negeri Sipil di Bank BJB KCP Pangleseran dilaksanakan secara sistematis melalui delapan tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan permohonan hingga *monitoring* pasca pencairan. Faktor determinan utama yang memengaruhi keputusan kelayakan kredit adalah: (1) status kolektibilitas nasabah berdasarkan data SLIK OJK, dengan syarat minimum kolektibilitas 1 (lancar); (2) kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi; (3) rasio DSR yang tidak melebihi 70% penghasilan; dan (4) adanya surat rekomendasi dari atasan langsung sebagai bentuk jaminan moral dan administratif.

Analisis menggunakan kerangka 5C menunjukkan bahwa penilaian kredit PNS di Bank BJB KCP Pangleseran mencakup seluruh dimensi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* secara terintegrasi. Penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat mencerminkan implementasi manajemen risiko kredit yang efektif dalam menjaga kualitas portofolio kredit bank. Penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis bagi Bank BJB KCP Pangleseran: pertama, mengembangkan sistem verifikasi dokumen otomatis yang terintegrasi dengan *database* BKN dan Dukcapil guna mendeteksi pemalsuan dokumen secara *real-time* dan mempercepat proses analisis; kedua, meningkatkan fitur pengajuan kredit pada aplikasi BJB Digi agar PNS dapat mengajukan permohonan kredit secara digital dengan tetap memenuhi standar kehati-hatian yang dipersyaratkan regulasi OJK.

## 5. PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf Bank BJB KCP Pangleseran atas kesempatan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan program *internship*. Apresiasi juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing M. Wahyu Hamijaya, M.M., Dosen Penguji Reka Ramadhan, M.Pd., dan Ketua Program Studi Manajemen Ana Yuliana Jasuni, M.M., Universitas Nusa Putra Sukabumi, atas arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan ini.

## REFERENSI

- Afandi, P. (2020). Analisis Implementasi 5c Bank Bpr Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah ( Studi Kasus Pada Pd Bpr Bank Salatiga Dan Pt Bpr Kridaharta Salatiga). *Among Makarti*, 3(5), 55–69.
- Akbar, M. F., Prasetyawati, E., Pumpungan, M., & Timur, J. (2024). Legalitas Sk Pegawai Negeri Sipil Yang Dijadikan Jaminan Kredit Perbankan. *Aliansi*, 1(5), 29–41.
- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh Konsep 5c Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti. *Business Management Analysis Journal (Bmaj)*, 3(2), 158–173.
- Bahagia, H. G. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Yang Berasal Dari Dana Titipan Pemerintah Di Saat Pandemi Covid-19. *Privat Law*, 13(2), 206–214.
- Ceysa, S. D., Putri, J. D., & Putri, D. A. (2024). Peranan Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25959–25964.
- Dara, R. R., Nubatonis, O. J., & Jacob, Y. M. Y. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Petium Law Journal*, 2(2), 429–443.



- Fauzan, M., & Khairunnisa. (2023). Determinansi Non-Performing Loan Industri Perbankan Pada Kbm1 3 Dan Kbm1 4 Tahun 2019-2021. *Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis*, 7(2), 752–765.
- Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019). Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (Btpn) Kantor Cabang Bengkulu). *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Komputer Dan Sains*, 1(1), 297–309.
- Hulmun, N. W., & Anwar, S. (2025). Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kcp Ciawi. *Karimah Taubid*, 4(9), 6863–6875.
- Laratmase, P., Artino, A., & Siregar, S. E. (2024). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(7), 4037–4051.
- Manda, G. S. (2022). Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Bumh Periode 2015-2020. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 12(1), 22–32.
- Putri, E. A., & Yahanan, A. (2021). Ertanggungjawaban Hukum Bank Yang Menghilangkan Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Kredit Oleh. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Perbankan*, 4(3), 283–299. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3295>
- Silmi, S. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Pt . Bank. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2(7), 654–662.
- Takarendehang, Y. V, Mangantar, M., Dotulong, L. O. H., Pada, B., Bank, P. T., Persero, M., Kota, T. B. K., Studi, M., Ekonomi, F., Manajemen, J., & Ratulangi, U. S. (2023). Kasus Pada Bank Mandiri Cabang Dotulonglasut Manado ) Analysis Of The Process Of Granting Msme Loans And Resolving Non- Performing Loans At Pt . Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Manado City ( Case Study At Bank Mandiri Dotulonglasut Manado Branch ) Jurnal Emb. *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1314–1324.
- Wulandari, P., Suherman, A., Noor, I., Program, S., Accounting, O., Sukabumi, M., & Kredit, A. (2025). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Proses Analisis Kredit Sebagai Upaya Mencegah Kredit Macet ( Studi Kasus Bank Bjb Kcp Jampangkulon ). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1378–1399.